

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SDGs ini dirancang setelah berakhirnya MDGs (Millenium Development Goals) pada tahun 2015 (Alisjahbana, 2021). Konsep Kesejahteraan tidak sekedar dipahami sebagai ukuran material saja, melainkan sebagai kemampuan suatu keluarga dalam mencukupi seluruh kebutuhan hidup secara menyeluruh yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kualitas hidup yang layak serta produktif (Mulia, 2020). Paradigma masyarakat yang kerap muncul adalah mengaitkan kesejahteraan secara linier dengan tingkat pendidikan. Masyarakat cenderung meyakini bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang memadai.

Kesejahteraan ini merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Menurut (Shavira, Balafif, 2021) Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang diupayakan secara terus menerus dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah dituntut untuk terus mengupayakan pembangunan di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan dan peningkatan kualitas hidup.

Kesejahteraan ini dapat dinilai dari aspek pemerataan pendapatan, akses pendidikan yang mudah dijangkau serta kualitas kesehatan yang merata. Untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia, *United Nations Development Programme* (UNDP) yang merupakan lembaga dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memperkenalkan indikator *Human Development Index* (HDI) atau di Indonesia dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Mulia, 2020). Laporan mengenai pembangunan sumber daya manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kerap menimbulkan polemik dan pro-kontra. Namun secara umum telah disepakati bahwa pembangunan SDM memiliki peran yang sangat penting dan menjadi faktor dalam keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator yang mencerminkan keberhasilan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan sektor lainnya (BPS, 2010).

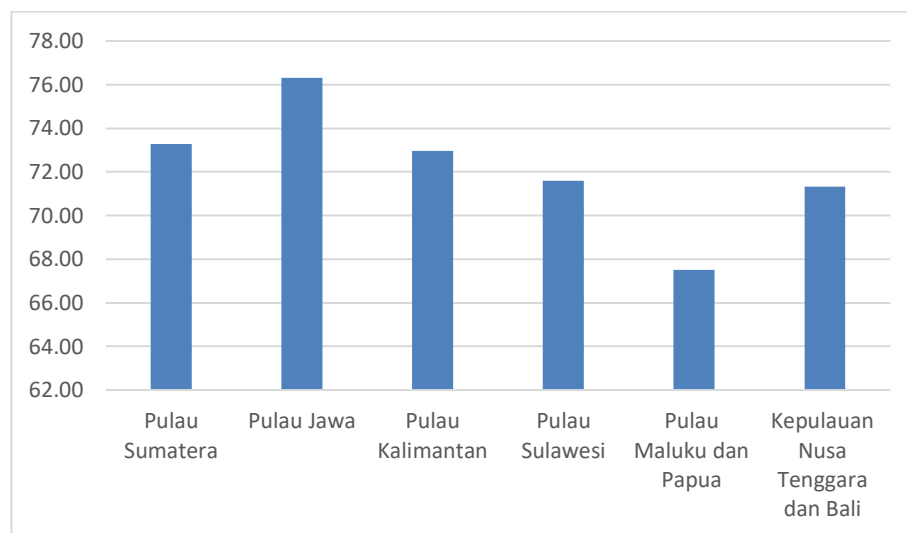
Menurut (BPS, 2023) IPM ini dihitung dari rata-rata skor capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. secara fisik, IPM dapat dilihat melalui indikator seperti harapan hidup, sedangkan secara non fisik dapat diamati melalui rata-rata lama sekolah, tingkat melek huruf dan kemampuan ekonomi masyarakat. Secara umum, IPM bertujuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana manusia tidak hanya diposisikan sebagai objek pembangunan saja, tetapi juga diharapkan sebagai subjek yang berkontribusi positif terhadap kemajuan suatu wilayah atau negara (Asnidar, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah, Menurut (Yusuf, 2022) Dari sisi kesehatan, IPM menunjukkan bahwa semakin baik tingkat kesehatan penduduk di suatu wilayah, semakin tinggi pula produktivitas mereka. Peningkatan produktivitas ini berdampak positif pada kinerja manusia secara keseluruhan, sehingga mendukung efisiensi ekonomi. Kemudian dari sisi pendidikan, IPM menggambarkan tingkat keterampilan dan kompetensi tenaga kerja yang terbentuk melalui pendidikan yang memadai. Pendidikan juga dinilai sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam mendorong akumulasi modal, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendukung berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Melalui pendidikan inilah tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai bagian dari pembangunan modal manusia (*Human Capital*).

Selain itu, standar hidup layak juga menjadi komponen penting. ketika masyarakat di suatu wilayah memiliki pengeluaran perkapita riil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, maka akan berpengaruh pada kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Dengan demikian IPM berperan sebagai modal utama dalam mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang lebih baik. Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh (BPS, 2023), IPM di Indonesia dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu rendah jika (<60), Sedang jika ($60 \leq \text{IPM} < 70$), tinggi jika ($70 \leq \text{IPM} < 80$), dan Sangat tinggi jika (≥ 80). Secara nasional IPM Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 74,39, mengalami peningkatan

sebesar 0,62 poin atau 0,84 persen dibandingkan tahun 2022 yang berada di angka 73,77. Dengan demikian IPM Indonesia pada tahun 2023 termasuk kedalam kategori tinggi. Berikut merupakan capaian rata – rata IPM menurut Pulau di Indonesia tahun 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 1. 1 Capaian IPM Menurut Pulau tahun 2023 (Point)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, terlihat bahwa Pulau Jawa memiliki nilai IPM tertinggi sebesar 76,32 yang menunjukkan pembangunan manusia yang relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Kemudian Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan berada di posisi kedua dan ketiga dengan IPM masing-masing sebesar 73,28 dan 72,96. Pulau Sulawesi serta Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki nilai IPM yang hampir setara, yaitu 71,59 dan 71,3. Sebaliknya, Pulau Maluku dan Papua menunjukkan IPM terendah yaitu sebesar 67,52 yang mencerminkan pembangunan di wilayah tersebut masih tertinggal (BPS, 2023).

Pulau Jawa merupakan Pulau terbesar kelima yang luas wilayahnya 126.700 Kilometer Persegi, yang terdiri dari enam provinsi dan memiliki kondisi Geografis serta sumber daya yang berbeda. Pemilihan Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian didasarkan pada kontribusinya terhadap perekonomian nasional, pusat pemerintahan dan pendidikan di Indonesia, serta didukung dengan jumlah penduduk tertinggi diantara pulau lainnya. Berdasarkan data BPS (2023), jumlah penduduk di Pulau Jawa pada tahun 2023 mencapai 155,56 juta jiwa, atau sekitar 55,84 persen dari total penduduk Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa menjadi pusat utama kegiatan sosial, ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa yang relatif stabil di antara pulau lainnya semakin memperkuat relevansinya sebagai fokus penelitian, mengingat perannya yang signifikan dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Berikut merupakan capaian IPM menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2021 - 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 1. 2 IPM Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Point)

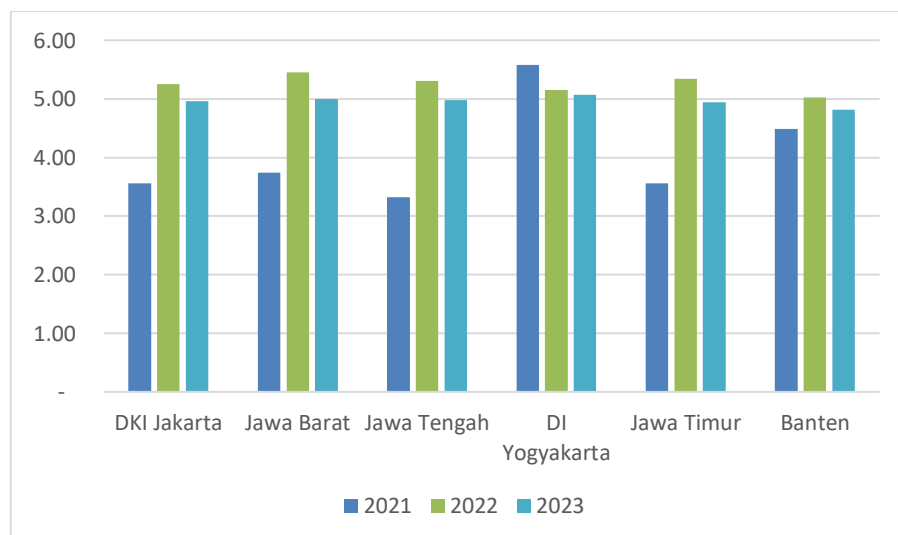
Berdasarkan gambar 1.2, Salah satu provinsi dengan capaian IPM tertinggi dan berada di atas rata-rata nasional adalah DKI Jakarta, yang mencatat angka 81,65 pada tahun 2022 dan meningkat menjadi 82,46 pada tahun 2023, dengan kenaikan sebesar 0,81 poin. Disusul oleh DI Yogyakarta yang berada pada kategori tinggi dengan peningkatan dari 80,64 menjadi 81,07 menunjukkan kenaikan 0,43 poin dan bergerak mendekati kategori sangat tinggi. Kedua provinsi tersebut memiliki IPM di atas rata-rata nasional dikarenakan berbagai faktor, seperti salah satunya dari segi pendidikan, dimana DKI Jakarta memiliki banyak sekolah unggulan dan universitas ternama selain daripada itu DKI Jakarta juga mempunyai program KJP (Kartu Jakarta Pintar) yang membantu akses pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, sementara DI Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan perguruan tinggi berkualitas seperti UGM dan UNY. Salah satu faktor tersebut mendorong angka harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang lebih tinggi. Tingginya pendidikan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya berkontribusi terhadap produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas ini berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Sementara itu, provinsi lain seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berada dalam kategori IPM Tinggi dengan nilai IPM pada rentang 72,75 hingga 73,87. Meskipun berada pada kategori IPM tinggi namun keempat provinsi tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional. Bahkan terdapat selisih 9,08 poin antara IPM DKI Jakarta dan IPM Jawa Timur yang memiliki nilai terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Perbedaan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam berbagai aspek pembangunan manusia termasuk akses pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, tingkat ekonomi dan kesempatan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Todaro & Smith (2003), Idealnya keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga melalui pencapaian tiga nilai pokok utama, yaitu kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (*sustenance*), peningkatan rasa harga diri sebagai manusia (*self esteem*) dan kebebasan masyarakat dalam membuat pilihan hidup yang lebih baik (*freedom from servitude*). Dengan demikian, pembangunan yang ideal mencakup aspek multidimensi yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan pemerataan dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Arsyad, 2015).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia adalah rendahnya tingkat pembangunan manusia, kesejahteraan yang belum merata serta kesenjangan ekonomi yang signifikan (Sanjaya, 2022). Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. hal ini sejalan dengan fokus utama dari SDGs khususnya pada poin ke delapan yang menyoroti pentingnya pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Yahya, 2021) Kondisi perekonomian menjadi salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan proses peningkatan output perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang (Zahari, 2017). Ini berarti bahwa kesejahteraan masyarakat tercermin dari naiknya output perkapita yang menyediakan lebih banyak pilihan untuk dikonsumsi baik itu dari barang ataupun jasa yang disertai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Setiap wilayah biasanya menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Ekonomi di suatu wilayah dapat dikatakan berkembang dan tumbuh apabila aktivitas ekonomi di wilayah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian periode sebelumnya (Perwitasari, 2023). Berikut ini merupakan grafik pertumbuhan ekonomi menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2021 – 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Pulau Jawa(Point)

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa seluruh provinsi di Pulau Jawa mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi khususnya pada tahun 2023. DKI Jakarta mengalami penurunan dari 5,25 persen menjadi 4,96, kemudian Jawa Barat turun dari 5,45 persen menjadi 5 persen. Jawa Tengah juga mencatat penurunan dari 5,31 menjadi 4,98 persen, DI Yogyakarta yang sebelumnya tumbuh sebesar 5,15 persen tetapi pada tahun 2023 hanya mencapai 5,07 persen. Sementara Jawa Timur turun dari 5,34 persen menjadi 4,95 persen dan Banten dari 5,03 persen menjadi 4,81 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, terjadi secara merata di enam provinsi di Pulau Jawa, dimana setiap provinsi mengalami penurunan tingkat pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut (Ronald, 2024) Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh menurunnya konsumsi rumah tangga akibat tekanan inflasi, perlambatan investasi serta melemahnya ekspor-impor di tengah ketidakpastian global. Selain itu, disinflasi global yang terjadi juga menyebabkan kesenjangan antara pertumbuhan PDB riil dan nominal, sehingga menekan margin keuntungan pelaku usaha dan memperlambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2023 khususnya di Pulau Jawa. Penelitian yang dilakukan oleh (Arisyanto, 2023) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sutrisno Iwantoro yang dikutip dalam jurnal (Nailufarh, 2010) perekonomian Indonesia secara makro menunjukan perfoma yang baik, namun di sisi lain terdapat suatu realitas ketimpangan dan kemiskinan yang masih terdapat

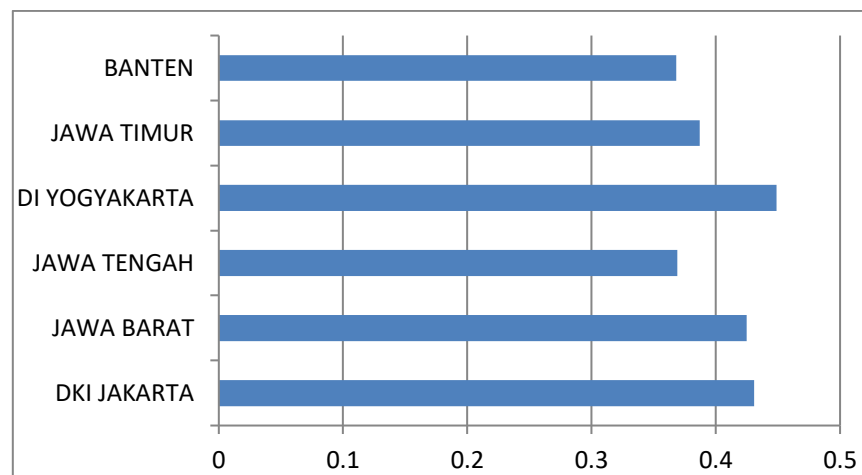
pada sebagian rakyat Indonesia. Kemiskinan ini terjadi karena akibat dari adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini akan berdampak pada penurunan kualitas sumberdaya manusia, yang pada akhirnya akan menyebabkan produktivitas dan pendapatan mereka menjadi rendah (Purnama, 2017). Dari pendapatan rendah tersebut mengakibatkan kesenjangan atau perbedaan distribusi pendapatan antara penduduk miskin dan orang yang mampu.

Menurut Todaro yang dikutip dalam jurnal (Prastiwi, 2023) Ketimpangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan antara pendapatan individu ataupun kelompok yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Kondisi ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah (Arka, 2015).

Menurut Dumairy yang dikutip dalam jurnal (Perwitasari, 2023) bahwasanya distribusi pendapatan yang berkaitan dengan pemerataan pendapatan dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat. kemudian distribusi pendapatan antar wilayah seperti (antar provinsi dan antar kawasan bagian barat, tengah, timur) dan yang terakhir distribusi pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan.

Perbedaan distribusi pendapatan dapat dilihat dari variasi angka Gini Ratio, yang merupakan Indikator untuk mengukur perbedaan distribusi pendapatan, nilai gini ratio berkisar antara 0 – 1 menunjukkan distribusi pendapatan yang sempurna,

sedangkan 1 menunjukkan ketimpangan pendapatan yang sempurna (BPS, 2023). Sedangkan Menurut (Wibowo, 2016) Ketimpangan dianggap rendah jika nilai Indeks Gini berada di bawah 0,3. Sementara itu, ketimpangan masuk kategori sedang jika nilai Indeks Gini berada di rentang 0,3 hingga 0,5 dan ketimpangan dianggap tinggi atau sangat timpang jika Indeks Gini melebihi 0,5. berikut merupakan grafik Gini Ratio menurut provinsi di Pulau Jawa.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023 (data diolah)

Gambar 1.4 Indeks Gini Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2023 (Point)

Berdasarkan Gambar 1.4 Gini Ratio di wilayah pulau jawa angka tertinggi terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai 0,449 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di provinsi tersebut. Tingginya Gini Ratio di DI Yogyakarta disebabkan oleh adanya perbedaan yang cukup lebar antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah dimana Upah Minimum pada tahun 2023 di daerah ini hanya mencapai Rp1.981.782,39, kemudian dominasi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan para pekerja seperti pekerja hotel,

pedagang kecil atau pemandu wisata yang umumnya memiliki penghasilan lebih rendah dan tidak menentu. Selain itu, keberadaan mahasiswa dalam jumlah besar serta hanya didominasi oleh sektor informal yang memiliki pendapatan tidak tetap juga menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka gini ratio di provinsi ini. Selanjutnya DKI Jakarta sebagai posisi kedua dengan angka gini ratio pada tahun 2023 sebesar 0,431. Kemudian Jawa Barat dengan angka gini ratio sebesar 0,425. Disusul dengan Jawa Timur yang memiliki angka gini ratio sebesar 0,387 dan Jawa Tengah sebesar 0,369. sedangkan angka gini ratio terendah berada di provinsi banten dengan nilai 0,368.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun berada dalam satu pulau yang sama, perbedaan distribusi pendapatan antar provinsi masih cukup mencolok walaupun perbedaannya tidak terlalu besar. Semakin tinggi indeks gini ratio, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut dan akan berpotensi terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini dapat memicu berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran dan keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan serta infrastruktur.

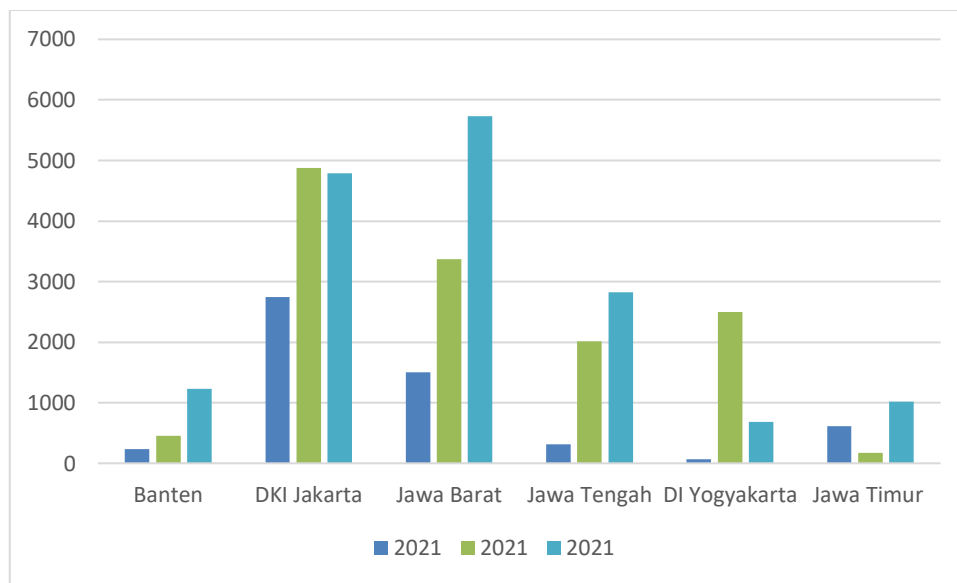
Perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, akan berdampak pada variasi pendapatan yang dihasilkan. Sehingga terjadi perbedaan pendapatan antar daerah. Dimana daerah yang memiliki sumber daya yang melimpah dan faktor produksi khususnya pada barang modal (*Capital Stock*) cenderung akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumberdaya yang terbatas (Sanjaya, 2022). Penelitian yang dilakukan

oleh (Sihite, 2024) mengungkapkan bahwa perbedaan pendapatan atau ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2024) yang menyatakan bahwa Gini ratio berpengaruh positif dan adanya hubungannya dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Salah satu upaya untuk mengurangi perbedaan distribusi pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui Zakat. Kemiskinan dan Zakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Zakat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Agama Islam untuk mengatasi perbedaan distribusi pendapatan dan kemiskinan, dengan cara menghimpun Dana Zakat dan menyalurkannya secara tepat sasaran (Rofiuddin, 2021).

Secara umum Zakat merupakan Kewajiban umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya apabila telah memenuhi syarat syarat tertentu. Sedangkan Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang secara sukarela untuk kepentingan umum atau kegiatan yang bermanfaat bagi sesama. Dan sedekah merupakan harta ataupun selain daripada harta yang dikeluarkan oleh seseorang diluar zakat secara sukarela tanpa dibatasi jumlah dan waktu tertentu. Di Indonesia Ketiga instrumen tersebut dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS sendiri merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas mengelola, menghimpun dan menyalurkan dana kepada para mustahik seperti fakir miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Potensi zakat nasional di Indonesia pada tahun 2023 mencapai Rp. 327 Triliun. Namun realisasi

penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 baru mencapai Rp. 33 Triliun atau sekitar 10,09 persen dari total potensinya. Berikut merupakan grafik penyaluran Dana ZIS menurut provinsi di pulau jawa.



Sumber : BAZNAS RI, 2023 (data diolah)

Gambar 1. 5 Penyaluran Dana ZIS di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2023 (Milyar Rupiah)

Berdasarkan data pada gambar 1.5 Distribusi Dana ZIS-DSKL di Pulau Jawa pada tahun 2021 – 2023, dimana Provinsi Banten mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 Dana yang didistribusikan sebesar Rp. 237,23 Miliar, kemudian pada tahun 2023 meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp. 1,299 Triliun. DKI Jakarta juga mengalami kenaikan dengan distribusinya pada tahun 2021 sebesar Rp. 2,747 Triliun naik menjadi Rp. 4,877 Triliun pada tahun 2022 kenaikannya mencapai 77,5 persen, namun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan sebesar 1, 8 persen menjadi Rp.4,791 Triliun. Kemudian Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan terbesar secara nominal, pada

tahun 2021 dari Rp. 1,502 Triliun meningkat menjadi Rp. 5,728 triliun pada tahun 2023 kenaikannya mencapai 70 persen.

Jawa Barat menjadi provinsi dengan distribusi dana ZIS tertinggi di Pulau Jawa, karena provinsi ini merupakan provinsi dengan Jumlah penduduk terbesar di Pulau Jawa BPS mencatat bahwasanya Jumlah Penduduk di Jawa Barat sebesar 49.306,8 ribu jiwa, Populasi yang besar akan meningkatkan potensi penghimpunan dan penyaluran dana ZIS, Selain daripada itu Jawa Barat juga memiliki Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS yang aktif, termasuk di tingkat kabupaten/kota sehingga distribusi dana ZIS lebih masif dan didukung sebagai pusat pendidikan Islam, dimana banyaknya Pondok Pesantren dan Institusi keislaman yang menjadi penerima manfaat dari dana ZIS, selain itu, tingkat kemiskinan yang masih menjadi perhatian turut mendorong distribusi dana lebih besar kepada mustahik di Jawa Barat.

Jawa Tengah juga mengalami lonjakan yang signifikan dengan distribusi dana meningkat dari Rp. 311,67 Miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 2,826 Triliun pada tahun 2023 peningkatannya mencapai 40,1 persen. DI Yogyakarta mencatatkan lonjakan yang signifikan pada tahun 2022, kemudian mengalami penurunan drastis di tahun 2023 dimana penurunannya sebesar -72,5 persen. Dan Jawa Timur mengalami penurunan yang tajam sebesar -71,7 persen pada tahun 2022. Namun meningkat kembali dengan kenaikan yang luar biasa pada tahun 2023 yang penyalurannya mencapai Rp. 1,016 Triliun.

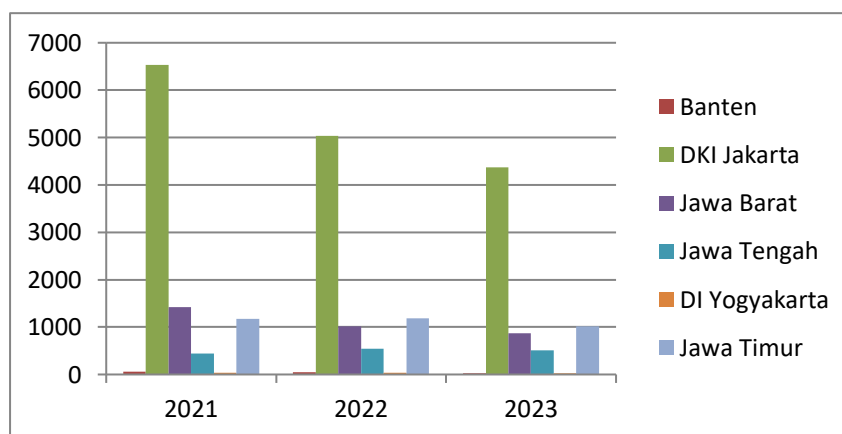
Secara umum tujuan dari zakat itu sendiri yaitu untuk mengangkat derajat individu dari kalangan yang kurang mampu (Mustahik) menuju kemandirian ekonomi, dengan harapan mereka dapat berubah menjadi pembayar zakat (Muzakki). Zakat juga bertujuan untuk membersihkan harta, meningkatkan kepedulian sosial serta mendistribusikan kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Indonesia Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam, menjadikan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) ini sebagai bentuk filantropi yang berkontribusi dalam proses pembangunan sosial dan ekonomi (Firmansyah, 2024). Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2023) menunjukkan bahwa Distribusi Dana ZIS berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo & Gunaefi, 2021) yang menyatakan bahwa Distribusi ZIS Berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Selain ZIS sebagai Instrumen distribusi kekayaan dari filantropi Islam, Pemerintah juga membuat program untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui Program Bantuan Sosial yang dipelopori oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Menurut Perpres No 63 Tahun 2017 Bantuan Sosial adalah Bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap resiko sosial. Resiko sosial adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerentanan sosial pada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana alam, yang tanpa bantuan sosial dapat memperburuk kondisi hidup mereka.

Bantuan Sosial (Bansos) bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti sandang, pangan papan, Kesehatan dan pendidikan. Dimana Pemerintah membuat berbagai bentuk Bansos diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan disertai pendampingan dan edukasi. Selain itu ada Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang berupa bahan makanan pokok yang disalurkan kepada masyarakat miskin. Kemudian ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial kepada keluarga yang kurang mampu atau penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dan dalam segi pendidikan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) yang memberikan bantuan kepada anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk memastikan mereka dapat melanjutkan pendidikan (Ajun, 2024).

Melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) pemerintah akan mengalokasikan anggaran untuk mendanai dalam mendorong kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan kebijakan alokatif, dimana dalam hal ini pemerintah berperan merancang kebijakan yang memastikan anggaran daerah dialokasikan untuk sektor-sektor strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Agar kebijakan tersebut efektif, alokasi anggaran harus dilakukan dengan tepat sesuai dengan jenis-jenis pengeluaran yang meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja hibah serta belanja bantuan sosial. Selain APBD sumber anggaran Bantuan Sosial juga berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), Dana Desa, serta Sumber lainnya seperti Hibah,

Donasi atau CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Adib, 2019). Berikut merupakan grafik pengeluaran belanja bantuan sosial menurut provinsi di Pulau Jawa tahun 2021 – 2023.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2023 (data diolah)

Gambar 1.6 Belanja Bansos Menurut Provinsi di Pulau Jawa (Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1.6 terlihat bahwa adanya fluktuasi yang signifikan dalam belanja bantuan sosial di berbagai provinsi di pulau Jawa pada tahun 2021 – 2023. Secara keseluruhan, belanja bansos menurun di semua provinsi, yang dapat mencerminkan pengurangan anggaran atau menurunnya kebutuhan bantuan sosial. Dimana setiap tahunnya DKI Jakarta memiliki anggaran belanja bansos tertinggi, meskipun turun signifikan dari 6528.36 miliar pada tahun 2021 menjadi 4367.71 miliar rupiah pada tahun 2023. Menurut DJPK Kemenkeu (2021) Tingginya APBD DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi lain disebabkan oleh statusnya sebagai Ibu kota negara sekaligus sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian tentunya akan mendapatkan PAD yang cukup tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi. Selain itu kepadatan penduduk yang tinggi berkontribusi pada meningkatnya kebutuhan layanan publik serta alokasi anggaran yang lebih besar untuk berbagai sektor, termasuk infrastruktur,

pendidikan dan kesehatan. Tak hanya itu, tingginya jumlah penduduk miskin di Jakarta juga mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran untuk program Bantuan Sosial guna mendukung kesejahteraan masyarakat yang rentan.

Kemudian Jawa Barat juga mengalami penurunan anggaran belanja bansos dari 1425.69 miliar rupiah pada tahun 2021 turun menjadi 866.51 miliar rupiah pada tahun 2023. Sebaliknya, DI Yogyakarta mencatat realisasi anggaran bantuan sosial terendah yaitu 31.59 miliar rupiah dan turun sedikit pada tahun 2023. Berbeda dengan Jawa Tengah yang mengalami kenaikan realisasi anggaran belanja bansos pada tahun 2021 – 2022 namun kembali turun pada tahun 2023 sebesar 511.57 miliar rupiah. Jawa Timur menunjukkan tren yang stabil sebelum akhirnya mengalami penurunan realisasi belanja bansos pada tahun 2023. Dan yang terakhir Banten mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2023 sebesar 27.65 miliar rupiah. Penelitian mengenai Bantuan sosial dilakukan oleh (Sutanto, 2024) menunjukkan bahwa belanja Bantuan Sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yeniwati, 2020) yang menyatakan bahwa Pengeluaran Pemerintah bidang bantuan sosial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap IPM.

Penelitian Sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek kesejahteraan, namun belum komprehensif. seperti yang dilakukan oleh (Andriyani et.al, 2023) dan (Lamanele et.al, 2024) yang meneliti mengenai Pengaruh pertumbuhan ekonomi Terhadap kesejahteraan Masyarakat, namun belum mempertimbangkan variabel Distribusi Dana ZIS dan Bantuan Sosial. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh (Harsono & Purnama, 2024) serta (Siregar et.al, 2023) yang hanya berfokus

pada pengeluaran pemerintah seperti belanja bantuan sosial dan belanja pendidikan dan belanja kesehatan dan penelitian tersebut belum menggunakan variabel ketimpangan pendapatan dalam analisisnya. Research Gap ini menjadi salah satu urgensi dilakukannya penelitian ini.

Berdasarkan Permasalahan ekonomi dan juga kemiskinan di pulau Jawa, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Fokus kajian diarahkan untuk meneliti Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Distribusi Pendapatan, Dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dan Bantuan Sosial Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Jawa Tahun 2013 – 2023. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yang menggabungkan peran dana ZIS sebagai filantropi Islam dengan bantuan sosial sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau upaya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan sosial secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa tahun 2013 – 2023.

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan secara simultan atau secara bersama sama terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa tahun 2013 – 2023.
3. Bagaimana elastisitas kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan sosial.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan sosial secara parsial terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa tahun 2013 – 2023.
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan secara simultan atau secara bersama sama terhadap kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa tahun 2013 – 2023.
3. Elastisitas kesejahteraan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dana ZIS dan bantuan sosial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi media pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan teori - teori yang dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengasah pola pikir secara kritis dalam menganalisis permasalahan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Bagi pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun lembaga lembaga terkait, sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan yang tepat mengenai kesejahteraan masyarakat di pulau Jawa.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pulau Jawa yang mencakup Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

[illegible]